

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Sebagai Negara berkembang, Indonesia sedang giatnya melakukan pembangunan perekonomian nasional, sehingga pemerintah selalu mengupayakan peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, hal ini selaras dengan UUD 1945 dan Pancasila yang menuju masyarakat adil dan makmur. Perusahaan merupakan salah satu bentuk organisasi yang pada umumnya memiliki tujuan ingin mencapai keuntungan yang maksimal. Oleh karena itu perusahaan harus mampu untuk menjalankan kinerja perusahaan secara baik dan ditunjang dengan strategi yang matang termasuk kedalam segi manajemen keuangannya. Sehingga dapat mendorong perusahaan tersebut agar lebih selektif dalam beroperasi untuk mencapai keuntungan yang lebih tinggi dalam jangka panjang bisa terwujud.

Perangkoperasi sebagai salah satu sektor kekuatan ekonomi di Indonesia diharapkan dapat mewujudkan demokrasi perekonomian rakyat, oleh rakyat, dan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Perusahaan koperasi adalah alat bagi anggota untuk mempertinggi efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan-tujuan ekonomi mereka. Karena itu adanya sekelompok individu yang memiliki kepentingan dan atau tujuan ekonomi yang sama, menjadi syarat awal dalam pendirian organisasi koperasi.

Dalam hal memelihara kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional, pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berdasarkan kekeluargaan harus memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan. Hal itu yang dipertegas pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (1), yang berbunyi bahwa: “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”

Selanjutnya pada penjelasan 33 diungkapkan bahwa:

**“Produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Oleh sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi”**

Berdasarkan atas Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 tersebut dapat dijelaskan bahwa koperasi disusun atas asas kekeluargaan dengan cara demokrasi sehingga tidak mempermasalahkan perbedaan ras maupun suku karena adanya sifat toleransi antara sesama. Kegiatan-kegiatan ekonomi yang terjadi dilakukan secara bersama untuk kesejahteraan bersama yaitu masyarakat luas. Pengelolaan sumber daya alam yang tersedia oleh Negara harus dikelola dan dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kemakmuran bersama tidak hanya untuk orang-perorang maupun golongan masyarakat. Sehingga masyarakat dapat menerima manfaat ekonomi yang timbul dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan tersebut.

Koperasi memiliki peranan yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian, karena koperasi dinilai mampu memberikan berbagai kelebihan kepada para anggotanya atau masyarakat yang memanfaatkan keberadaannya. Pemberdayaan pada koperasi berkelanjutan dengan berkomitmen untuk mengembangkan ekonomi rakyat diharapkan dapat mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi secara nasional, mengurangi tingkat pengangguran yang terbuka, menurunkan tingkat kemiskinan, mendinamisaasi sektor riil, dan memperbaiki pemerataan pendapatan masyarakat di Indonesia.

Kesuksesan pada koperasi dapat dicapai melalui pengelolaan dengan baik serta diperlukannya manajemen koperasi yang bisa mengelola serta memberikan kinerja yang baik. Pengukuran dalam kinerja merupakan satu faktor penting bagi sebuah koperasi, pengukuran tersebut digunakan untuk menilai keberhasilan pada koperasi, dasar penyusunan imbalan, dan sebagai penyusunan strategi yang akan datang. Kinerja dapat diartikan sebagai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas secara aktual dan pencapaian nilai perusahaan. Kinerja dapat diartikan pula sebagai prestasi yang dicapai perusahaan dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan tersebut. (Sugiyarso & Winarni, 2005:111).

Penilaian kinerja keuangan penting bagi organisasi koperasi guna mengetahui pengalokasian dana yang dimiliki dengan cara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan koperasi yaitu memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin guna mempertahankan eksistensi pada koperasi. Koperasi yang ingin mempertahankan keeksistensinya perlu mengadakan evaluasi serta penilaian

terhadap kinerja di perusahaan, khususnya kinerja keuangan yang menjadi suatu faktor untuk penunjang koperasi dalam menjalankan proses usahanya. Perkembangan kinerja keuangan perusahaan bisa dilihat pada laporan keuangan tahunan yang diterbitkan oleh koperasi. Agar dapat memahami arti laporan keuangan, maka perlu dianalisis yaitu dengan menggunakan alat analisis keuangan.

Analisis laporan keuangan merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mengetahui kondisi dan posisi keuangan koperasi. Melalui analisis laporan keuangan pula dapat diketahui keberhasilan dalam mencapai prestasi yang diinginkan serta sehat atau tidaknya laporan tersebut, yang mana merupakan penilai dasar kinerja diseluruh bagian pada koperasi, serta untuk mengetahui tentang keunggulan dan kelemahan yang dimiliki koperasi sehingga dapat diketahui langkah-langkah apa saja yang harus diperbaiki.

Koperasi Pegawai Dinas Koperasi (KPDK) 12 Juli yang memiliki Nomor Badan Hukum: 3827/BH/IX-19/12-67 pada tanggal 02 September 1968. Sesuai dengan perkembangan zaman, KPDK 12 Juli Jawa Barat yang awalnya hanya melayani Pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat kini KPDK 12 Juli mulai melayani binaan Dinas Koperasi, para pengusaha, dan masyarakat umum.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan anggota, Koperasi Pegawai Dinas Koperasi (KPKD) 12 Juli Jawa Barat menyediakan pelayanan-pelayanan pada unit usaha, KPKD 12 Juli memiliki 4 unit usaha yang diantaranya:

1. Unit Warung Serba Ada
2. Unit Simpan Pinjam
3. Unit Fotocopy
4. Unit Jasa Rental Kendaraan

Keempat unit usaha Koperasi Pegawai Dinas Koperasi 12 Juli di kelola oleh 3 orang Pengawas yang terdiri dari ketua, sekretaris, anggota. 4 orang pengurus yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Dan 10 karyawan termasuk manajer. Berikut serta tabel perkembangan anggota Koperasi Pegawai Dinas Koperasi 12 Juli:

**Tabel 1. 1. Perkembangan Jumlah Anggota Pada KPKD 12 Juli**

Tahun	Kenggotaan				Jumlah anggota aktif (orang)
	Jenis anggota				
	Jumlah anggota di awal tahun (orang)	Anggota baru (orang)	Anggota tidak aktif (orang)	Anggota meninggal (orang)	
2015	200	22	8	0	200
2016	210	13	3	0	210
2017	214	17	13	0	214
2018	246	66	34	0	278
2019	268	49	27	0	290

Sumber: laporan RAT KPKD 12 JULI

Seringkali koperasi mengalami banyak kendala yang muncul saat koperasi menjalankan usahanya, sehingga membuat potret perkoperasian menjadi kurang sebaik badan usaha lainnya. Sering disebutkan bahwa masalah utama yang

dihadapi koperasi adalah yang berkaitan dengan kemampuan memupuk modal. Banyak pendapat dari para ahli yang menyatakan bahwa kesulitan modal dan adanya kesalahan pengelolaan sebagai faktor penghambat utama dalam upaya memajukan koperasi.

Ropke J (Dalam Sugiayanto 2007:5) mengatakan bahwa:

***“The capital function a cooperative is handicapped, because the amount of benefits available for a member is not dependent on his capital contribution but on his patronage of the cooperative”.***

Pendapat tersebut menjelaskan bahwa koperasi kurang menarik bagi anggota ataupun stakeholders lainnya karena timbal balik yang diterima oleh pemilik (anggota) bukan dilihat dari kontribusinya sebagai pengguna koperasi. Imbasnya apabila pemilik tidak memiliki motivasi untuk menanamkan modalnya dengan jumlah yang banyak yang pada akhirnya akan mengakibatkan sulitnya bagi koperasi dalam pengumpulan modal sendiri.

Permasalahan sumber permodalan koperasi seringkali diindikasikan oleh sulitnya pengumpulan modal sendiri berupa Simpanan Wajib dan Simpanan Pokok. Pendapatan pada simpanan pokok hanya pada saat anggota masuk menjadi anggota, berarti untuk menambah simpanan pokok harus menambah anggota. Anggota memiliki kedudukan ganda pada koperasi yaitu sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa. Pada kedudukannya anggota sebagai pemilik yaitu anggota berpartisipasi dalam himpunan modal pada koperasi. sedangkan bila koperasi akan meningkatkan sumber modal dari simpanan wajib, maka koperasi harus menaikkan besaran simpanan wajib, hal ini bila dilakukan harus menunggu

keputusan Rapat Anggota. Harapan lain untuk meningkatkan sumber modal sendiri adalah dari penyisihan SHU, imbasnya sisa hasil usaha yang dibagikan pada anggota akan sangat terbatas. Sehingga koperasi memerlukan tambahan modal dari luar berupa modal pinjaman. Struktur modal merupakan pendukung penentuan pertumbuhan dan daya taha koperasi. Struktur modal memberikan dampak strategis untuk menentukan pencapaian tujuan jangka panjang koperasi. Kondisi tersebut dapat digambarkan pada tabel berikut :

**Tabel 1.2 Total Aktiva, Total Modal Pinjaman dan Total Modal Sendiri Koperasi Pegawai Dinas Koperasi (KPKD) 12 Juli Tahun 2015-2019**

Tahun	Tota Aktiva (Rp)	Total Modal Sendiri (Rp)	Total Modal Pinjaman (Rp)	SHU (Rp)	DAR (%)	ROE (%)
2015	4.595.519.113	2.639.817.454	1.038.243.232	112.539.762	22,59	4,26
2016	6.492.585.220	3.088.049.248	1.546.554.817	148.144.223	23,82	4,80
2017	5.885.256.372	3.377.596.117	1.546.554.817	104.171.903	26,28	3,08
2018	7.443.857.061	3.285.242.708	1.643.901.889	112.086.916	22,08	3,41
2019	7.149.479.431	3.331.043.479	1.285.656.379	80.132.865	17,98	2,41

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Pengurus KPKD 12 Juli

Berdasarkan tabel 1.2 dapat diketahui bahwa kebanyakan sumber permodalan Koperasi Pegawai Dinas Koperasi (KPKD) 12 Juli dipenuhi oleh modal sendiri, artinya modal pinjaman hanya menjadi bagian kecil saja. *Debt to Asset Ratio* (DAR) KPKD 12 Juli mengalami fluktuasi, yaitu pada tahun 2015-2017 terus mengalami peningkatan yang darinya 22,59% menjadi 26,2% serta turun kembali hingga tahun 2019 menjadi 17,98%. Penurunan ini mengindikasikan bahwa modal pinjaman yang digunakan untuk mendanai aktiva semakin menurun disetiap tahunnya. Suatu usaha sebagian besar didanai oleh modal sendiri akan memberi keuntungan yang lebih besar sebab tidak terikat oleh

kewajiban membayar beban bunga, hanya saja *Return On Equity* (ROE) KPDK 12 Juli tersebut menunjukkan keadaan yang tidak baik. Proporsi modal pinjaman yang sangat kecil ternyata tidak membuat ROE membaik, justru ROE dari tahun ketahun cenderung mengalami penurunan.

Turunnya tingkat ROE juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu tingkat perputaran Aktiva dan profit margin, hal ini dijelaskan juga oleh Bambang Riyanto (2008:43) menyatakan bahwa “suatu sistem analisa yang dimaksud untuk menunjukkan hubungan antara “return on investment, asset turnover”, dan “profit margin” sering di sebut *du pont system*”.

Pendekatan dengan analisis *Du Pont System* merupakan salah satu alat ukur untuk mengukur kinerja keuangan yang relevan guna melihat sejauh mana efektifitas pada koperasi dalam pengembalian saham yang dilakukan oleh koperasi atau *return on investment* (ROI). Menurut Lianto (2013) , mengatakan bahwa perhitungan *return on investment* (ROI) dan *Return On Equity* (ROE) dapat dilakukan dengan cara analisis *Du Pont System* yaitu analisis yang menggabungkan antara rasio profitabilitas dan rasio aktivitas.

SHU Koperasi sebagai laba bersih bagi para anggota koperasi dan juga sebagai sumber modal koperasi seharusnya memiliki kestabilan serta peningkatan sesuai dengan asset yang dimilikinya. Namun pada kenyataannya, kondisi keuangan KPDK 12 Juli kurang baik yang bias ditandai dengan terus menurunnya ROI selama 5 tahun berturut-turut, hal ini dapat menyebabkan kekecewaan dan tertanggungnya permodalan koperasi.

Mengacu pada uraian permasalahan tersebut, maka penelitian ini mengkhususkan pada uji pengaruh struktur modal terhadap *Return On Equity*, struktur modal dinilai menggunakan *Debt to Equity Ratio* dengan perhitungan *Return On Equity* secara Du Pont. Maka dapat ditarik sebuah tujuan penelitian yaitu untuk mengukur tingkat ROE pada Koperasi Pegawai Dinas Koperasi (KPKD) 12 Juli Jawa Barat. Maka, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian tentang “ **Analisis Struktur Modal Dalam Upaya Meningkatkan Return On Equity (ROE)**”

### **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang yang telah disampaikan di awal, akan memfokuskan beberapa indikator permasalahan yang diantaranya, yaitu:

1. Bagaimana struktur modal pada Koperasi Pegawai Dinas Koperasi (KPKD) 12 Juli.
2. Bagaimana perkembangan *Return On Equity (ROE)* pada Koperasi Pegawai Dinas Koperasi (KPKD) 12 Juli.
3. Apa saja upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan *Return On Equity (ROE)* pada Koperasi Pegawai Dinas Koperasi (KPKD) 12 Juli.

### **1.3. Maksud dan tujuan penelitian**

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi dan data yang dibutuhkan agar diolah dan dianalisis berkenaan dengan masalah yang diteliti.

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui:

1. Perkembangan struktur modal pada Koperasi Pegawai Dinas Koperasi (KPDK) 12 Juli.
2. Perkembangan *Return On Equity* (ROE) pada Koperasi Pegawai Dinas Koperasi (KPDK) 12 Juli.
3. Upaya – upaya yang dilakukan untuk meningkatkan *Return On Equity* (ROE) pada Koperasi Pegawai Dinas Koperasi (KDPK) 12 Juli.

#### **1.4. Kegunaan Penelitian**

##### **1.4.1. Aspek Praktis**

Aspek praktis diharapkan bermanfaat bagi pengurus atau pengelola koperasi sebagai bahan informasi atau masukan yang bermanfaat sebagai dasar dalam penentuan kebijakan dan pengambilan keputusan.. Bagi para pengurus dan anggota koperasi, yang diteliti, yaitu sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pada saat selanjutnya. Dengan memberikan masukan mengenai upaya-upaya dalam meningkatkan kinerja keuangan koperasi sehingga mampu berada pada standar kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah.

##### **1.4.2. Aspek Teoritis**

Peneliti sendiri, dapat memperoleh manfaat dalam meningkatkan pengetahuan baik secara teoritis maupun praktis terutama dalam penerapan teori-teori yang ada dalam manajemen keuangan yang didapat selama dibangku kuliah juga sarana pengembangan ilmu pengetahuan peneliti lain, yaitu dengan adanya penelitian ini semoga dapat berbagi sumber informasi dalam melakukan penelitian selanjutnya.